

HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-AUSTRALIA: KEPENTINGAN AUSTRALIA DALAM MERATIFIKASI *INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT* TAHUN 2019

Astari Marisa¹

Abstract

At present, the global economy is faced with the challenges of a trade war. It makes all countries interdependent with other countries. one example of them is bilateral relations between Indonesia and Australia. Beginning in 1971 the establishment of the Indonesian embassy for Australia in Yarralumla, Canberra. Indonesia and Australia have good neighborly commitments in the form of developing mutually beneficial cooperation. In 2013 there were tensions between the two countries which resulted in the suspension of IA-CEPA activities and Indonesia recalled Ambassador Nadjib Riphath from Canberra. In 2016, Australia initiated the IA-CEPA to be reactivated. Through the visit of the Indonesian finance minister to Australia. 2019 is the beginning of relations between Indonesia and Australia getting stronger. Australia has a dominant role in this relationship so that Australia's interests are very visible. This bilateral cooperation was strengthened by the existence of an agreement namely the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) The main focus of this bilateral cooperation was in the fields of economy and security. When talking about economic interests and dependencies, Neoliberalism and Interdependence of Liberalism can be used in discussing the problem.

Keywords: Ratification, IA-CEPA, Bilateral Relations

Abstrak

Saat ini, ekonomi global dihadapkan dengan tantangan perang dagang. Hal ini membuat semua negara saling bergantung dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Dimulai pada tahun 1971 berdirinya kantor kedutaan besar Indonesia untuk Australia di Yarralumla, Canberra. Indonesia dan Australia memiliki komitmen bertetangga yang baik dalam bentuk pengembangan kerjasama yang saling menguntungkan. Pada 2013 terjadi ketegangan antara kedua negara yang mana berdampak pada penangguhan kegiatan *IA-CEPA* dan Indonesia pun memanggil pulang Duta Besar Nadjib Riphath dari Canberra. Pada 2016, Australia memprakarsai *IA-CEPA* harus diaktifkan kembali. Melalui kunjungan menteri keuangan Indonesia, Sri Mulyani, ke Australia. Tahun 2019 adalah awal mula hubungan antara Indonesia dan Australia semakin menguat. Australia memiliki peran yang cukup dominan dalam hubungan tersebut sehingga sangat terlihat adanya kepentingan Australia. Kerjasama bilateral ini diperkuat dengan adanya sebuah perjanjian yakni *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*. Fokus utama dari kerjasama bilateral ini adalah di bidang ekonomi dan keamanan. Jika berbicara mengenai kepentingan dan ketergantungan ekonomi, Neoliberalisme dan Interdependence Liberalism dapat digunakan dalam membahas masalah tersebut.

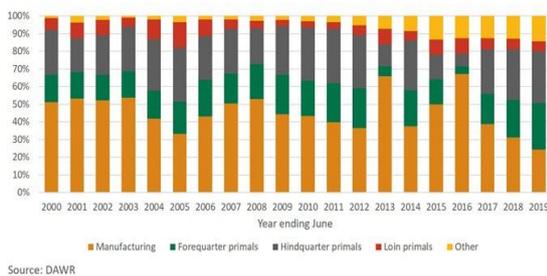
Kata Kunci; Ratifikasi, IA-CEPA, Hubungan Bilateral

¹ Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email : Astari.mg17@mhs.uinjkt.ac.id

Latar Belakang

Indonesia dan Australia memiliki letak geografis yang strategis sehingga tidak mengherankan jika hubungan kedua negara dapat terjalin. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia dimulai dengan berdirinya kantor kedutaan besar Indonesia untuk Australia di Yarralumla, Canberra di tahun 1971. Pada 2005, Indonesia dan Australia mengadakan *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* untuk memperkuat fondasi kerjasama di antara dua negara tersebut. *Joint Declaration* ini diselenggarakan pasca tragedi tsunami yang menimpa Aceh tahun 2004, yang mana Australia membantu untuk *recovery* wilayah Aceh dengan biaya mencapai 45 milyar rupiah (Kedutaan Besar Indonesia di Australia, 2009).

Australian beef export cut mix to Indonesia



Tabel 1: Australian Beef Export Cut Mix to Indonesia

Gambar tabel 1 merupakan tren ekspor daging sapi Australia terhadap Indonesia. Dapat dilihat pada gambar bahwa meskipun daging sapi di pasar Indonesia banyak yang berasal dari Australia, namun pada kenyataannya Australia lebih banyak mengekspor barang-barang manufaktur seperti baja, besi, dll. ke Indonesia. Pada tahun 2006, pasca *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* ekspor manufaktur Australia ke Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga tahun 2010. Selain di bagian manufaktur, ternyata pada bagian

ekspor daging sapi Australia ke Indonesia trend nya relatif stabil. Kemudian pada bulan November 2010, untuk mewujudkan hubungan kemitraan yang kuat pada bidang ekonomi, kedua negara sepakat untuk membentuk *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*. Lalu dilihat juga dari trend di atas, pasca IA-CEPA dirumuskan, pada tahun 2011-2013 kegiatan ekspor Australia ke Indonesia selalu mengalami kenaikan. Dengan IA-CEPA, kedua negara berharap ekonomi di kedua negara dapat meningkat, terutama di sektor perdagangan dan investasi.

Jika terjalin hubungan antara dua negara, konflik tidak dapat dihindari. Dikutip dari *BBC News*, mencuat isu penyadapan yang dilakukan oleh Australia sejak 2009 terhadap pejabat tinggi negara di Indonesia yang mana salah satu dugaan tujuan dari penyadapan ini adalah untuk mengetahui strategi diplomasi yang digunakan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Akibat dari kejadian ini, pada 2013 terjadi ketegangan antara kedua negara yang mana berdampak pada penangguhan kegiatan IA-CEPA dan Indonesia pun memanggil pulang Duta Besar Nadjib Riphath dari Canberra (BBC NEWS, 2013). Pada tahun 2014,

Australia sangat merasakan dampak dari ketegangan ekonomi dengan Indonesia yang mana trend ekspor di bidang manufaktur menurun drastis. Sedangkan pada daging sapi, ekspor cenderung mengalami kenaikan. Alasan utama daging sapi terus mengalami peningkatan karena acara adat atau keagamaan di Indonesia banyak menggunakan sapi, sehingga permintaan daging sapi pun akan selalu banyak.

Pada 2016, Australia memprakarsai IA-CEPA harus diaktifkan kembali. Melalui kunjungan menteri keuangan Indonesia, Sri Mulyani, ke Australia yang mana ia bertemu dengan *Australian Treasurer*, Josh Frydenberg, untuk menandatangani amandemen

Memorandum of Understanding (MoU) tentang kebijakan dan kerjasama teknis antara Kementerian Keuangan Indonesia dan Departemen Keuangan Australia. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan IA-CEPA akan segera diaktifkan kembali. Dikutip dari *Fiscal News Badan Kebijakan Fiskal*, dalam pertemuan bilateral ini kedua pemimpin negara berbagi pandangan mereka tentang kondisi ekonomi global dan membahas upaya untuk meningkatkan kemitraan dalam kerjasama ekonomi dan keuangan (Badan Kebijakan Fiskal 2016). Selain itu, pertemuan tersebut membahas penyelesaian negosiasi IA-CEPA yang dianggap penting untuk kerjasama kedua belah pihak (Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional, 2019).

Indonesia-Australia

Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) belum menemukan kesepakatan. Lalu, pada Januari 2018 intensifikasi penyelesaian IA-CEPA akan dilakukan di tingkat ketua kelompok negosiasi. Kemudian pada pertengahan Agustus, negosiasi diselesaikan di tingkat ketua kelompok negosiasi dan pada akhir Agustus, deklarasi penyelesaian IA-CEPA ditandatangani oleh Menteri Perdagangan kedua negara yang disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Australia. Pada tanggal 26 November 2019, Parlemen Australia meratifikasi Perjanjian IA-CEPA, kemudian pada tahun 2020 IA-CEPA ditandatangani oleh pihak Indonesia. Dikutip dari *The Jakarta Post*, bagi Australia, IA-CEPA akan mencakup peningkatan akses bagi para petani sapi dan domba Australia ke pasar Indonesia yang berpenduduk 260 juta orang.(Septiari n.d.) Sedangkan, bagi Indonesia yang dikutip dari *The Foreign Ministry Of Indonesia news*, IA-CEPA sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan (VET) dan sektor pendidikan tinggi (Kementerian Luar negeri, 2020).

Tujuan dari tulisan ini adalah mencoba menjelaskan tentang keberadaan IA-CEPA terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Australia khususnya pasca Australia meratifikasi perjanjian IA-CEPA. Dari pemaparan di atas sudah dijelaskan bahwa Parlemen Australia meratifikasi perjanjian IA-CEPA pada 26 November 2019, sedangkan IA-CEPA diratifikasi oleh pihak Indonesia pada tahun 2020 (Septiari n.d.). Merujuk pernyataan tersebut, adanya kepentingan Australia dalam meratifikasi IA-CEPA sangat terlihat dan memunculkan pertanyaan, mengapa Australia lebih dulu meratifikasi perjanjian ini dan bagaimana dampak yang dirasakan Australia setelah diratifikasinya IA-CEPA. Apakah memberikan dampak positif atau negatif.

Neoliberalisme

Diskusi mengenai kepentingan Australia dalam kemitraan antara Indonesia dan Australia melalui IA-CEPA, akan didiskusikan menggunakan teori Neo Liberalisme. Teori Neo Liberalisme berfokus pada kerjasama ekonomi dan *global markets* untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Martin 2007). Neo Liberalisme percaya bahwa ekonomi dan rezim yang mengatur ekonomi dunia adalah sektor utama untuk menciptakan saling ketergantungan dengan aktor lain karena ekonomi pada dasarnya menjawab sebagian besar kepentingan negara, sehingga konflik dapat ditekan. Selain itu, menurut Neoliberalisme dengan adanya sistem anarkis atau struktur dunia akan mendorong dan menjadi peluang besar untuk melakukan kerjasama dalam bentuk perdagangan dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi (Baldwin 1993). Adapun prinsip utama Neoliberalisme menurut Steven Lamy (2001: 189-190) Pertama, bahwa negara adalah aktor kunci dalam hubungan internasional, tetapi bukan satu-satunya aktor yang berpengaruh. Kedua, dalam lingkungan yang kompetitif, negara berusaha mendapat keuntungan yang absolut melalui kerjasama, dimana perilaku rasional mendorong negara

mencari nilai lebih melalui jalan kerjasama, walaupun negara juga tidak terlalu hirau dengan keuntungan yang diperoleh negara lain melalui kesepakatan kerjasama. Ketiga, hambatan terbesar terhadap kesuksesan kerjasama adalah ketidakpatuhan atau kecurangan. Untuk itu kehadiran organisasi internasional menjadi penting adanya untuk tidak saja menjamin tercapainya kapatuhan tetapi juga menghindari terjadinya kecurangan. Keempat, kerjasama tidak pernah berjalan tanpa masalah, tetapi negara akan mengalihkan loyalitas dan sumber-sumber yang dimilikinya kepada institusi jika pengalihan ini menguntungkan semua pihak, serta institusi menyediakan peningkatan kesempatan bagi negara untuk mengamankan kepentingan nasionalnya pada level internasional.

Kaitannya dengan kasus ini adalah jika dilihat dari perspektif neoliberalisme hubungan antara Indonesia dengan Australia merupakan pilihan yang tepat untuk meminimalisir peperangan. Neoliberalisme juga menawarkan pembentukan institusi untuk menjamin tercapainya kapatuhan dan menghindari terjadinya kecurangan. Institusi atau instrument yang disepakati oleh kedua negara ini adalah sebuah perjanjian bilateral ekonomi yakni *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*. Dilihat dari perspektif Neoliberalisme juga kepentingan Australia terhadap IA-CEPA adalah adanya keinginan Australia untuk mendapatkan keuntungan absolut dari kegiatan ekonomi seperti ekspor ke Indonesia sehingga akan berpengaruh juga terhadap peningkatan valuta asing Australia.

Interdependence Liberalism

Turunan dari teori Neoliberalisme yakni teori *Interdependence Liberalism* juga dapat menjawab rumusan masalah dalam tulisan ini. Konsep ini muncul pasca perang dingin yang mana saat itu sedang

terjadi transformasi politik global yang besar, yaitu agenda politik mulai bergeser. Awalnya agenda politik global didominasi dengan kekuatan militer dan keamanan nasional berubah menjadi negara-negara sadar bahwa untuk mencapai kekuatan atau *power* tidak bisa sekedar senjata canggih melainkan harus ada landasan efisiensi ekonomi dan kemajuan teknologi yang aman. (Rana, 2015) Kemudian memunculkan perdebatan antara Realis dan Liberal, yang kemudian ilmuan dari Liberal Robert O Kohane dan Joseph S. Nye dengan buku yang berjudul “Power and Interdependence: World Politics in Transitions”, pada akhir 1970-an mereka mengenalkan model *Interdependence Complex* yang bagi Liberal dianggap dapat menjelaskan kondisi politik global dengan kemunculan aktor global baru seperti organisasi internasional dan perusahaan multinasional. Dalam interdependensi, negara-negara atau aktor akan saling bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama dan hasilnya akan memberikan kemakmuran dan kestabilan dalam sistem internasional. Aspek yang paling signifikan dalam interdependensi adalah adanya kombinasi dua pandangan yaitu integrasi antara unsur-unsur kekuasaan politik dan liberalism ekonomi sehingga hubungan yang terbentuk lebih mempertimbangkan biaya dan manfaat hubungan interdependensi. (Rana W. , 2015)

Terbentuknya IA-CEPA merupakan salah satu indikator bahwa Australia dan Indonesia saling bergantung antar satu sama lain. Pada Australia, hasil peternakan dan manufaktur merupakan *ingredients* penting yang dibutuhkan oleh Indonesia, sedangkan pada Indonesia, hasil pertanian merupakan *ingredients* penting yang dibutuhkan oleh Australia. Sehingga jika hubungan kedua negara diputus, akan menimbulkan ketimpangan dan akan mempengaruhi trend dalam neraca perdagangan masing-masing negara. Untuk itu, teori ini dapat menjawab bahwa peran dari IA-CEPA sangat lah penting untuk

menstabilkan perekonomian khususnya di bidang ekspor di masing-masing negara.

Metode Penelitian

Sebagaimana dinyatakan oleh Moleong, metode kualitatif dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah ketika berhadapan dengan banyak realitas. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih sensitif dan lebih mudah beradaptasi dengan banyak pengaruh penajaman bersama dan pola-pola nilai yang ditemui (Moleong, 2000). Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti berbicara secara langsung dan mengamati beberapa orang, dan berinteraksi selama beberapa bulan untuk mempelajari latar, kebiasaan, perilaku dan karakteristik fisik dan mental orang yang sedang dipelajari. Bogdan dan Biklen menyarankan bahwa karakteristik penelitian kualitatif adalah alami, data deskriptif bukan angka, analisis data induktif, dan makna sangat penting dalam penelitian kualitatif (Robert C. Bogdan and sari Knop Biklen, 1982)

Selain itu, penelitian kualitatif digunakan jika masalahnya belum jelas, untuk mengetahui makna tersembunyi, dan memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, serta memeriksa perkembangan sejarah (Iskandar 2009). Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian. Deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dalam tulisan ini, penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika hubungan bilateral Indonesia

dengan Australia, faktor penyebab Australia meratifikasi perjanjian bilateral berupa IA-CEPA, serta dampak yang dirasakan oleh Australia di tahun 2019 yang akan dijelaskan secara jelas dan mendalam.

Faktor-aktor Penyebab Australia Meratifikasi IA-CEPA

Pasca isu penyadapan Australia terhadap Indonesia tahun 2013 menyebabkan hubungan antara kedua negara ini menjadi renggang dan menghambat perumusan perjanjian IA-CEPA, hubungan antara dua negara ini mulai membaik pada 2016. Lalu tahun 2019, perjanjian IA-CEPA selesai dan Australia segera meratifikasi perjanjian tersebut, sedangkan Indonesia meratifikasi pada tahun 2020. Jika dilihat dari waktu ratifikasinya, perjanjian IA-CEPA adalah sebuah perjanjian yang memiliki arti yang sangat penting bagi Australia, hal ini dikarenakan isi perjanjian IA-CEPA fokus pada pertahanan dan kerjasama ekonomi di kedua negara. Dalam kerjasama ekonomi dibagi menjadi beberapa bagian yakni adanya pendanaan infrastruktur Australia kepada Indonesia, investasi berupa pembangunan manusia untuk Indonesia dari Australia, serta adanya pembebasan biaya impor barang-barang dari Australia. Sedangkan dalam bidang pertahanan Australia ingin melindungi dirinya dari terorisme dan kejahatan transnasional lainnya (Australia Government, Departement Of Foreign Affairs and Trade, 2019).

Faktor Kerjasama Ekonomi

A. Pendanaan Infrastuktur Oleh Australia Untuk Indonesia

Membangun ketahanan ekonomi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Australia adalah mitra tepercaya dengan lebih dari 40 tahun keterlibatan dengan Indonesia dalam reformasi ekonomi dan infrastruktur. Bantuan teknis Australia

telah membantu Indonesia mengurangi biaya administrasi lebih dari AUD.1,7 miliar sehingga menghasilkan lebih banyak anggaran nasional Australia untuk investasi dalam program sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Australia telah membantu Indonesia merencanakan, menganggarkan dan mengakses pinjaman multilateral, memanfaatkan lebih dari AUD.2 miliar untuk prioritas keuangan infrastruktur. Indonesia telah berkomitmen AUD.50 juta dari anggaran nasional untuk meluncurkan pilot yang didanai Australia untuk memberikan insentif pada pemeliharaan jalan di provinsi dan kabupaten agar lebih baik.

EXPENDITURE		
Table 1 Total Australian ODA Expenditure in FY 2018-19		
Objective	A\$ million	% of total ODA
<i>Bilateral</i>		
Objective 1: Effective Economic Institutions and Infrastructure	107.0	31.9%
Objective 2: Human Development for a Productive and Healthy Society	114.0	34.0%
Objective 3: An Inclusive Society Through Effective Governance	58.0	17.3%
Sub-Total Bilateral	279.0	83.2%
Regional and Global	49.9	14.9%
Other Government Departments	6.7	1.9%
Total ODA Expenditure	335.6	100%

Tabel 2: Total Australian ODA Expenditure

Pada tabel 2, dapat dilihat tahun 2018 Australia memberikan AUD.331,6 juta melalui *Official Development Assistance* (ODA) 2018,19 ke Indonesia. Australia adalah donor terbesar kelima bagi Indonesia (setelah Jepang, Jerman, Amerika Serikat, dan Prancis), dan donor hibah terbesar kedua. Dukungan Australia tetap menjadi sumber nasihat dan keahlian yang berharga bagi Pemerintah Indonesia. Pada tahun 2019, Wakil Presiden Indonesia, Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan, semuanya menulis surat kepada *Australia's Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade* mengenai *Australia's Development Program* dan menegaskan kembali bahwa kemitraan pembangunan Indonesia dan Australia sangat dihargai

dalam mendukung pengembangan kebijakan dan elemen fundamental hubungan bilateral kedua negara (Australia Government, Departement Of Foreign Affairs and Trade, 2019). Bantuan pembangunan Australia telah berkurang setengahnya selama lima tahun terakhir yang mana mencerminkan kemajuan dan perubahan Indonesia dalam cara Australia memberikan bantuan. Australia adalah sumber inovasi, gagasan, dan keahlian untuk memajukan reformasi dan mencoba pendekatan baru untuk membuka fase pertumbuhan ekonomi inklusif selanjutnya.

Australia bekerjasama dengan Indonesia untuk mengkatalisasi investasi dan mempromosikan penggunaan sumber dayanya sendiri secara efektif. Pada program 2018,19 juga, Australia meningkatkan hibah kepada Indonesia sebesar AUD4,3 miliar (lebih dari 15 kali kontribusi ODA bilateral kedua negara) dari bank pembangunan multilateral, sektor swasta, dan Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk peningkatan infrastruktur, pembangunan sosial dan ekonomi. Program bantuan Australia di Indonesia memenuhi target kerangka kerja kinerja strategis Pemerintah Australia. Pada program 2018-19, pengeluaran bantuan untuk perdagangan Australia mencapai target 20 persen, berkontribusi pada peningkatan iklim perdagangan, investasi, infrastruktur, dan pekerjaan. Untuk kesetaraan gender, kinerja meningkat dari 83 persen menjadi 85 persen dari investasi yang secara efektif menangani kesetaraan gender yang dinilai melalui proses *Aid Quality Check* (AQC). Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh pembentukan dan implementasi program *Gender Equality and Social Inclusion* (GESI) untuk mengatasi kendala dalam inklusi sosial. (Australia Government, Departement Of Foreign Affairs and Trade, 2019)

B. Bantuan Pembangunan Manusia dari Australia

Bantuan pembangunan manusia dari Australia merupakan salah satu cara investasi Australia dalam pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Australia telah melakukan upaya bersama dengan Indonesia untuk menjaga tingkat kemiskinan di bawah 10 persen di Indonesia melalui program anti-kemiskinan yang ditargetkan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum miskin dan rentan. Hal ini dikarenakan Indonesia terus menuju status negara berpenghasilan menengah, namun angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi diperkirakan 25,14 juta jiwa, yang mana banyak di antara mereka bertempat tinggal di daerah yang sulit dijangkau. (Australia Government, Departement Of Foreign Affairs and Trade, 2019). Meskipun ada peningkatan dalam pendanaan sekolah dan akses ke sekolah, anak-anak Indonesia tidak belajar keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk berhasil dalam angkatan kerja. Selain itu, akses air dan sanitasi sangat penting untuk kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Meskipun ada peningkatan air bersih yang signifikan dalam pertumbuhan kota-kota di Indonesia namun sulit memastikan semua orang menerima layanan ini. Menjaga sanitasi dan kebersihan yang baik adalah tantangan khusus, termasuk di daerah pedesaan dan terpencil. Hal ini berkontribusi pada tingginya tingkat stunting di antara anak-anak Indonesia. 9 juta anak yang terhambat secara permanen, mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mereka dan secara signifikan menurunkan prospek belajar mereka sebagai orang dewasa. Indonesia menghadapi kehilangan dua hingga tiga persen dari PDB per tahun jika tingkat *stunting* ini berlanjut.

Australia bekerjasama dengan Indonesia untuk mengurangi tingkat *stunting* yang tinggi yang disebabkan oleh kekurangan gizi dan air yang tidak aman. Survei kesehatan nasional tahun 2018 menemukan bahwa tingkat stunting di Indonesia adalah 30,8 persen. Nutrisi yang

buruk dan penyakit yang berulang pada anak usia dini, yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak-anak, adalah penyebab utama. Bank Dunia telah mengambil pengalaman dari pilot-pilot yang didanai Australia untuk meningkatkan basis bukti pada penggerak stunting untuk menginformasikan Strategi Nasional Indonesia untuk Mempercepat Pencegahan Stunting (2018-2024). (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2018) Strategi ini - menggambar pada alat keterlibatan warga, fasilitasi, dan mekanisme pelatihan pendidikan anak usia dini, bertujuan untuk menghubungkan berbagai intervensi pemberian layanan desa untuk mengatasi penyebab stunting. Australia mendukung program nasional pemerintah Indonesia tentang pencegahan stunting melalui pekerjaan kami di bidang air dan sanitasi, dan intervensi gizi khusus dengan mencegah anemia defisiensi besi di antara wanita hamil dan gadis remaja. Sebagai contoh, kami bermitra dengan Nutrition International dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan komitmen mereka pada program mikronutrien utama. Akibatnya, prevalensi anemia di kalangan wanita hamil telah menurun dari 35 persen menjadi 31 persen. (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2018)

Pada tahun 2018, selain dukungan teknis Australia untuk membantu meningkatkan kualitas air, Australia juga membantu guru di Indonesia melalui peningkatan sistem dan praktik untuk perekrutan guru serta *continuous professional development* (CPD). Bantuan Australia memberikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) proyeksi yang lebih akurat tentang kebutuhan perekrutan guru. (Administrator kiatguru.org, 2019) Pada tahun 2018, kantor Wakil Presiden menggunakan data ini untuk mengumumkan perekrutan 100.000 guru

per tahun hingga tahun 2024, mengakui sumber daya yang dibutuhkan untuk menyampaikan pendidikan berkualitas di seluruh negeri. Australia juga mendukung Kementerian Agama (Depag) untuk memberikan CPD untuk guru di sekolah-sekolah Islam (madrasah) dan guru agama di sekolah umum dan sekolah agama. Madrasah sering terletak di daerah terpencil dan miskin dengan guru yang dilatih secara informal. Depag didukung untuk menyusun dan mengeluarkan Peraturan Menteri baru yang memberikan dasar hukum bagi lebih dari 1 juta guru madrasah, dan sekitar 250.000 guru agama di sekolah umum untuk mengakses program-program PKB reguler dan standar (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2018).

C. Pembebasan Bea Masuk Ke Indonesia Untuk Australia

Indonesia akan menghapus tarif bea masuk sebesar 94% untuk barang dari Australia. Sektor industri utama di kedua negara yang akan mendapat manfaat dari penghapusan tarif ini termasuk otomotif, tekstil, alas kaki, makanan dan minuman, serta furnitur. Namun Indonesia tidak menghapuskan tarif pada berbagai produk pertanian dan agribisnis, termasuk sapi hidup, kategori tertentu seperti kambing dan domba, babi beku, olahan makanan laut, beberapa produk susu, dan beberapa buah dan sayuran segar. Sejumlah produk pertanian sensitif seperti beras, gula, *wine* juga dikecualikan dari komitmen pengurangan tarif dari Indonesia. Pemerintah Indonesia berpandangan bahwa beras dan gula adalah komoditas pertanian pokok yang perlu diatur dan dipantau mengingat tingginya tingkat konsumsi produk-produk tersebut dan untuk melindungi petani lokal. Sementara kebutuhan untuk melindungi petani lokal dapat dikenali, IA-CEPA harus memastikan bahwa tarif yang diterapkan ke Australia dikurangi sebanyak mungkin dan

berada pada tingkat yang sama dengan yang diterapkan ke negara lain.

Faktor Keamanan

Terorisme menjadi masalah serius bagi Australia karena dapat mengganggu stabilitas negara. Pada 6 Desember 2019, diselenggarakan pertemuan antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dengan Australia di Bali. Dalam pertemuan tersebut para Menteri menggarisbawahi kemitraan antara Australia dan Indonesia dalam melawan terorisme dan ekstremisme kekerasan di wilayah Indonesia dan Australia khususnya yang sejalan dengan Pilar Tiga CSP. Selain itu, para Menteri membahas kerjasama operasional yang saling menguntungkan dan efektif. Para Menteri mengakui pentingnya pemeliharaan perdamaian sebagai kunci kerjasama praktis dalam hubungan bilateral. Australia memuji peran utama Indonesia dalam berkontribusi upaya pemeliharaan perdamaian global. Para Menteri menegaskan kembali komitmen mereka untuk mempromosikan agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. Selain isu terorisme, keamanan siber juga menjadi hal yang penting untuk kedua negara ini. Para Menteri menekankan pentingnya peran internet yang terbuka, bebas dan aman dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan keamanan nasional dan menjaga stabilitas internasional.

Selain untuk memberantas terorisme, Indonesia dan Australia sepakat untuk menguatkan keamanan maritim kedua negara tersebut. Dikutip dari Berita Kemhan, Menhan Indonesia menjelaskan, pada pertemuan bilateral Indonesia dan Australia kali ini membahas dan mencari upaya peningkatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Secara rinci banyak bidang yang kita akan memulai, diantaranya TNI diundang untuk ikut serta dalam latihan-latihan lebih banyak di Australia. Indonesia juga membahas

kemungkinan untuk pertama kali kita melaksanakan diplomasi dalam *peace keeping operations* untuk PBB. Menhan Indonesia juga mengungkapkan bahwa Indonesia memandang Australia sebagai sahabat dan mitra penting. Secara garis besar kerjasama di bidang pertahanan kedua negara sudah terjalin sangat baik, namun perlu ditingkatkan lebih baik lagi.

Dampak IA-CEPA Terhadap Australia

a. Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, Australia sudah sangat membantu Indonesia dalam bentuk pendanaan, investasi dan ekspor. Bantuan dalam bentuk ekonomi ini tentu memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dari segi investasi, Investasi asing membantu Australia mencapai potensi ekonominya dengan menyediakan modal untuk membiayai industri baru dan meningkatkan industri yang ada, meningkatkan infrastruktur dan produktivitas, dan menciptakan peluang kerja dalam proses tersebut. Pertumbuhan yang lebih tinggi didukung oleh investasi asing membayar dividen untuk semua warga Australia dengan meningkatkan pendapatan pajak kepada pemerintah federal dan negara bagian, dan meningkatkan dana yang tersedia untuk dihabiskan di rumah sakit, sekolah, jalan, dan layanan penting lainnya. Investasi asing memiliki manfaat lain selain menyuntikkan modal baru. Dengan membawa bisnis baru dengan koneksi di pasar yang berbeda, itu membuka peluang ekspor tambahan, meningkatkan kinerja ekspor Australia secara keseluruhan. Hal ini juga mendorong kompetisi dan peningkatan inovasi dengan menghadirkan teknologi dan layanan baru ke pasar Australia. (Trade, 2019)

Selain itu, dampak yang dirasakan oleh Australia dengan adanya pembebasan bea masuk ke Indonesia sangat menguntungkan Australia. Australia dapat mengirimkan hasil manufaktur berupa baja, besi, furnitur, dll ke Indonesia dengan

pembebasan biaya sehingga produk-produk manufaktur Australia bisa dijual di pasar Indonesia. Ketetapan pembebasan biaya dilakukan pada barang manufaktur saja, lain halnya dengan produk daging sapi. Salah satu alasan Indonesia tidak membebaskan biaya bea masuk pada daging sapi adalah menjaga produk lokal agar tetap laku di pasar lokal. Namun, hal ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ekspor Australia. Dalam arti lain, permintaan daging sapi Australia di Indonesia relatif mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Dari segi bantuan pembangunan manusia di Indonesia, hal ini berkaitan dengan program yang diberikan Australia kepada Indonesia yakni *Official Development Assistance* (ODA). Australia melihat bahwa Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberapa tahun terakhir dan mencapai kemajuan pembangunan yang substansial, namun pembangunan di seluruh negeri tidak merata yang mana tingkat kemiskinan di Papua tujuh kali lebih tinggi daripada di Jawa. Ketidaksetaraan tetap menjadi tantangan yang mendesak bagi pemerintah. Lebih dari 72 juta orang di Indonesia terus hidup di bawah garis kemiskinan \$3,20 per hari Bank Dunia. Konteks ini menjadikan pekerjaan Australia di Indonesia menjadi semakin penting, karena pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia menguntungkan Australia dan berkontribusi terhadap pertumbuhan dan stabilitas kawasan (Department Of Foreign Affairs and Trade Australia, 2019). Selain itu, Australia ingin mempromosikan kebijakan pendidikan yang ada di negaranya sehingga para pelajar Indonesia, ingin melanjutkan sekolah ke Australia.

b. Bidang Keamanan

Selain berdampak pada bidang ekonomi, ternyata IA-CEPA juga berpengaruh terhadap sektor keamanan yang mana Australia ingin meningkatkan

kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan di dua kawasan ini. Dengan adanya kerjasama keamanan dengan Indonesia melalui instrument IA-CEPA, Australia dapat dengan mudah mengetahui informasi mengenai terorisme khususnya di kawasan Asia Tenggara. Sehingga Australia dapat berjaga-jaga untuk melawan aksi terorisme. Salah satu cara Australia untuk berjaga-jaga adalah semua negara bagian dan wilayah di Australia dapat memberikan hibah darurat dan pembayaran kesulitan pribadi, yang umumnya difokuskan untuk menutupi pengeluaran jangka pendek seperti barang-barang pribadi yang penting dan darurat akomodasi. Pembayaran-pembayaran ini umumnya diberlakukan atas kebijaksanaan Menteri yang ditunjuk di setiap yurisdiksi dan dapat diberikan sebagai hibah atau sejenisnya. Pemerintah Persemakmuran dapat memberikan bantuan keuangan kepada negara dan wilayah serta individu (termasuk pedagang tunggal dan produsen utama) yang terkena dampak tindakan terorisme. *Disaster Recovery Payment (DRP)* atau pembayaran pemulihan bencana oleh pemerintah dan Tunjangan Pemulihan Bencana Pemerintah Australia (DRA) memungkinkan untuk memberikan bantuan keuangan kepada individu-individu yang telah terkena dampak bencana. DRP diaktifkan ketika dampak bencana pada individu dan keluarga memerlukan bantuan Pemerintah Persemakmuran. DRA adalah pembayaran bantuan pendapatan jangka pendek untuk membantu individu yang dapat menunjukkan bahwa pendapatan mereka telah terpengaruh sebagai akibat langsung dari bencana.

Pengaturan Bantuan Bencana Alam dan Pemulihan (NDRRA) memberikan bantuan keuangan kepada negara bagian dan wilayah yang mana bencana mengakibatkan pengeluaran berskala besar. Di bawah pengaturan ini, bantuan diberikan untuk kesulitan pribadi langsung dan pembayaran marabahaya serta hibah

pemulihan jangka panjang dan pinjaman lunak untuk individu yang membutuhkan untuk meringankan beban keuangan di negara bagian dan teritori. Ini juga mendukung penyediaan keuangan yang mendesak bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana. Di bawah pengaturan ini, pemerintah negara bagian atau wilayah menentukan mana daerah menerima bantuan NDRRA dan bantuan apa yang tersedia untuk individu dan masyarakat. NDRRA dapat tersedia setelah tindakan terorisme. Dampak yang dirasakan Australia dalam bidang keamanan adalah antisipasi Australia terhadap ancaman terorisme di negaranya.

Dari pemaparan di atas, dampak yang ditimbulkan dari IA-CEPA terhadap Australia memiliki nilai yang positif. Dampak yang paling dominan adalah bidang ekonomi yang mana Australia dapat memenuhi kepentingan nasionalnya dalam bentuk investasi asing. Selain itu, adanya aksi terorisme yang menimpa New Zealand tahun 2019, menjadikan salah satu alasan Australia meningkatkan keamanannya, sehingga dalam perumusan IA-CEPA isu terorisme diangkat. Dengan adanya pembahasan tentang terorisme dalam IA-CEPA ini, Australia dapat mengantisipasi negaranya sedini mungkin, sehingga jika terjadi aksi terorisme di negaranya, Australia sudah siap untuk melawan kelompok terorisme tersebut.

Kesimpulan

Dinamika hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia sangat luar biasa, yang mana terdapat banyak kejadian sehingga hubungan keduanya semakin menguat. Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia menjadi fokus utama. Hubungan ini akhirnya diperkuat dengan dibentuknya *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)* pada tahun 2010. Saat pembentukan IA-CEPA inilah semuanya berubah, Australia selalu

membantu Indonesia dalam berbagai hal khususnya dalam hal menyejahterakan masyarakat Indonesia. Hal ini sangat berguna bagi Australia karena meningkatkan valuta asing. Selain itu, Australia dapat mempromosikan dirinya sebagai negara yang bersahabat yang mana akhirnya menarik simpati masyarakat Indonesia agar dapat berkunjung atau bersekolah di Australia. Selain bidang ekonomi, Australia juga fokus pada bidang keamanan. Australia *insecure* dengan adanya kelompok terorisme sehingga perumusan dalam IA-CEPA pun membahas tentang keamanan dari kelompok terorisme. Australia sangat berharap dengan adanya IA-CEPA dapat membantu perekonomian serta memperkuat keamanan di wilayah Australia khususnya dari kelompok terorisme. Selain terorisme, peningkatan hubungan di bidang kemartitiman juga ditingkatkan. Australia memandang bahwa meningkatkan hubungan di sektor maritim dapat mencegah adanya penyerangan kelompok terorisme melalui jalur laut.

Daftar Pustaka

Artikel dalam Jurnal atau majalah:

- Rana, W. (2015). Theory of Complex Interdependence: A Comparative Analysis of Realist and Neoliberal Thoughts. *International Journal of Business and Social Science*,. *Interdependence*, 290.
- Rana, W. (2015). Theory of Complex Interdependence: A Comparative Analysis of Realist and Neoliberal Thoughts. *International Journal of Business and Social Science*,. *Interdependence*, 291.
- Kementerian Luar negeri. 2020. Ratifikasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)

Akan Dorong Kerja Sama Ekonomi Antara Indonesia Dan Australia.

<https://kemlu.go.id/melbourne/id/news/4701/ratifikasi-indonesia-australia-comprehensive-economic-partnership-agreement-ia-cepa-akan-dorong-kerja-sama-ekonomi-antara-indonesia-dan-australia>.

Badan Kebijakan Fiskal. 2016. Pertemuan Bilateral Menteri Keuangan Dengan *Treasurer Australia*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20181113163113345117197>.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia . (2019). *Indonesia – Australia Sepakati Kerjasama Keamanan Maritim*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia .

Australia Government, Departement Of Foreign Affairs and Trade. (2019). *AID PROGRAM PERFORMANCE REPORT 2018-19*. Australia Government, Departement Of Foreign Affairs and Trade.

Artikel dalam Koran:

- BBC NEWS. 2013. Australia Menyadap Indonesia Sejak 2007. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia.
- Administrator kiatguru.org. (2019). *Medan Berat Menuju Sekolah di NTT Tak Halangi Murid Belajar*. <https://kiatguru.org/public/public/2019/11/01/program-rintisan-kiat-guru-berhasil-meningkatkan-hasil-belajar-murid/>
- Septiari, Dian. “IA-CEPA Deal to Take RI-Australia Ties to New Level.” *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/news/201>

9/03/04/ia-cepa-deal-to-take-ri-australia-ties-to-new-level.html.

Buku:

Baldwin, David A. 1993. Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate. New York: Columbia University Press,.

Iskandar. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. ed. cetakan 1. Jakarta: Gaung Persada.

Martin, Lisa. 2007. Neoliberalism in Tim Dunne, Milja Kurki, and Steve Smith (Eds.) International Relations Theories. Oxford University Press,.

Dokumen Resmi:

Department Of Foreign Affairs and Trade Australia. (2019). *Overview of Australia's aid program in Indonesia*. Department Of Foreign Affairs and Trade Australia.

Kedutaan Besar Indonesia di Australia. (2009). *Bantuan Australia untuk Aceh*. Kedutaan Besar Indonesia di Australia.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan . (2018). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan .

Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional. 2019. IA-CEPA Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. [http://www.ilfa.or.id/assets/uploads/FS-FAQ of IA-CEPA as of 25 FEb rev.pdf](http://www.ilfa.or.id/assets/uploads/FS-FAQ%20of%20IA-CEPA%20as%20of%2025%20Feb%20rev.pdf).